



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

JL. OTONOM NO. 3 KOTARAJA WAHNO ABEPURA

JAYAPURA, 99226

0967-5186231

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura tahun 2024 dibuat dalam rangka pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran. Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Jayapura dalam rangka menuju terwujudnya *good governance*. Pelaksanaan visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Jayapura dilandasi tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian LAKIN ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura pada tahun anggaran 2024.

Jayapura, 24 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Hanna Hesky Pontoh



BAB 1

PENDAHULUAN

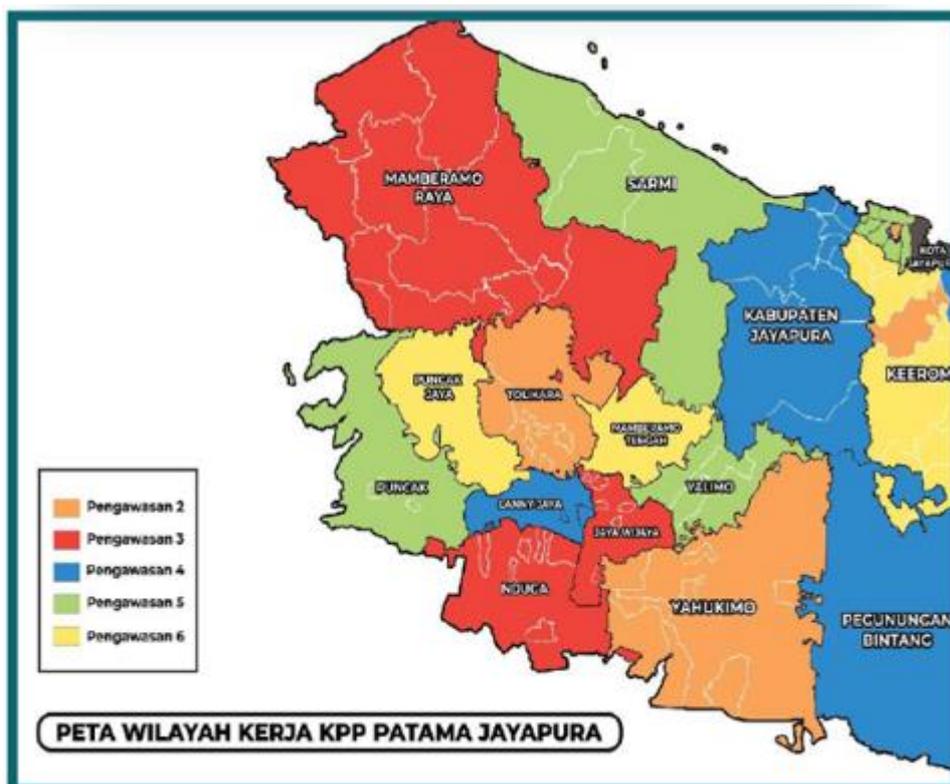
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura merupakan unit vertikal di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku. Sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut merupakan turunan dari visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024.

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan". Visi ini menjadi sangat penting terkait besarnya peran pajak dalam pembiayaan APBN. Untuk mencapai Visi tersebut, target penerimaan pajak nasional kemudian dibagi dan ditetapkan sampai ke unit KPP.

Meskipun penerimaan pajak merupakan sasaran strategis yang utama, sasaran strategis lain yang terkait tetap menjadi perhatian dan justru diharapkan mendukung tercapainya target penerimaan pajak yang optimal. Perspektif *balance scorecard* dalam pengukuran kinerja KPP mensyaratkan adanya keseimbangan dan keterkaitan dalam tiap perspektif tersebut.

KPP Pratama Jayapura memiliki beberapa karakteristik khusus sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, seperti wilayah yang luas dan menyebar serta kekhasan jenis Wajib Pajak yang dominan. Demikian juga dengan ketersediaan sumber daya manusia yang merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan. Dengan kondisi tersebut, KPP Pratama Jayapura memiliki tantangan tersendiri dalam upaya pencapaian target. Strategi yang tepat dan pengelolaan sumber daya yang tersedia dengan tepat merupakan hal yang dilakukan agar target dapat dipenuhi atau setidaknya mendekati target yang ditentukan.

A. Wilayah Kerja



Wilayah kerja KPP Pratama Jayapura meliputi satu kota dan empat belas kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura dibantu oleh dua Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), yaitu:

1. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wamena dengan wilayah kerja Kabupaten Jayawijaya, dan

2. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sarmi dengan wilayah kerja Kabupaten Sarmi.

Adapun wilayah kerja beserta luas wilayah daerah tingkat II/kota/kabupaten di KPP Pratama Jayapura adalah sebagai berikut.

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)
1	Kota Jayapura	835.48
2	Kabupaten Jayapura	14,082.21
3	Kabupaten Jayawijaya	2,629.01
4	Kabupaten Keerom	9526.32
5	Kabupaten Lanny Jaya	2,339.78
6	Kabupaten Mamberamo Tengah	4,101.50
7	Kabupaten Mamberamo Raya	28,042.39
8	Kabupaten Nduga	5,886.89
9	Kabupaten Pegunungan Bintang	13,751.92
10	Kabupaten Puncak Jaya	5,986.19
11	Kabupaten Puncak	7,701.50
12	Kabupaten Sarmi	14,068.37
13	Kabupaten Tolikara	2,990.01
14	Kabupaten Yahukimo	16,365.94
15	Kabupaten Yalimo	3,148.29
	Jumlah	131,455.80

*) Sumber: Data BPS Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Prov Papua Tengah tahun 2023

B. Sektor Usaha Dominan

Berdasarkan penerimaan tahun 2024, sektor dominan di KPP Pratama Jayapura adalah sebagai berikut:

No	Sektor	Persentase
1	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	53.85 %
2	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	13.56 %
3	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	12.61 %
4	Konstruksi	5.58 %
5	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	4 %
6	Sektor lainnya	10.41 %

Penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib memiliki peranan lebih dari 50% atas seluruh penerimaan pajak tahun 2024. Penerimaan dari sektor ini berasal dari setoran pajak oleh bendahara, yang terdiri dari bendahara pemerintah pusat (APBN), bendaharan pemerintah daerah (APBD) dan bendahara pemerintah desa (APBDes). Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi serta Sektor Perdagangan merupakan kontributor penerimaan terbesar kedua dan ketiga dengan kontribusi lebih dari 25% penerimaan total.



C. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai KPP Pratama Jayapura per 31 Desember 2024 berdasarkan penyebarannya di tiap seksi/unit adalah sebagai berikut:

No	Unit Organisasi	ES III/IV	Pelaksana	AR	OC	Jurusita	Fungsional	Jumlah
1	Kepala Kantor	1						1
2	Subbagian Umum dan Ketaatan Internal	1	9					9
3	Seksi Penjaminan Kualitas	1	1		2			4
4	Seksi Pelayanan	1	13				2	16
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	1	5			2		9
6	Seksi Pengawasan I	1		10				11
7	Seksi Pengawasan II	1		7				8
8	Seksi Pengawasan III	1		7				8
9	Seksi Pengawasan IV	1	1	7				9
10	Seksi Pengawasan V	1	1	6				8
11	Seksi Pengawasan VI	1		6				7
12	KP2KP Sarmi	1	1					2
13	KP2KP Wamena	1	3					4
14	Fungsional Pemeriksa Pajak						10	10
Total								106

Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan pendidikan, jenis kelamin dan rentang usia adalah sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	S2	S1/D4	D3	D1	SMA	<i>Jumlah</i>
Pendidikan	9	45	27	21	4	106

<i>Uraian</i>	<25	26-35	36-45	>46	<i>Jumlah</i>
Usia	23	26	42	15	106

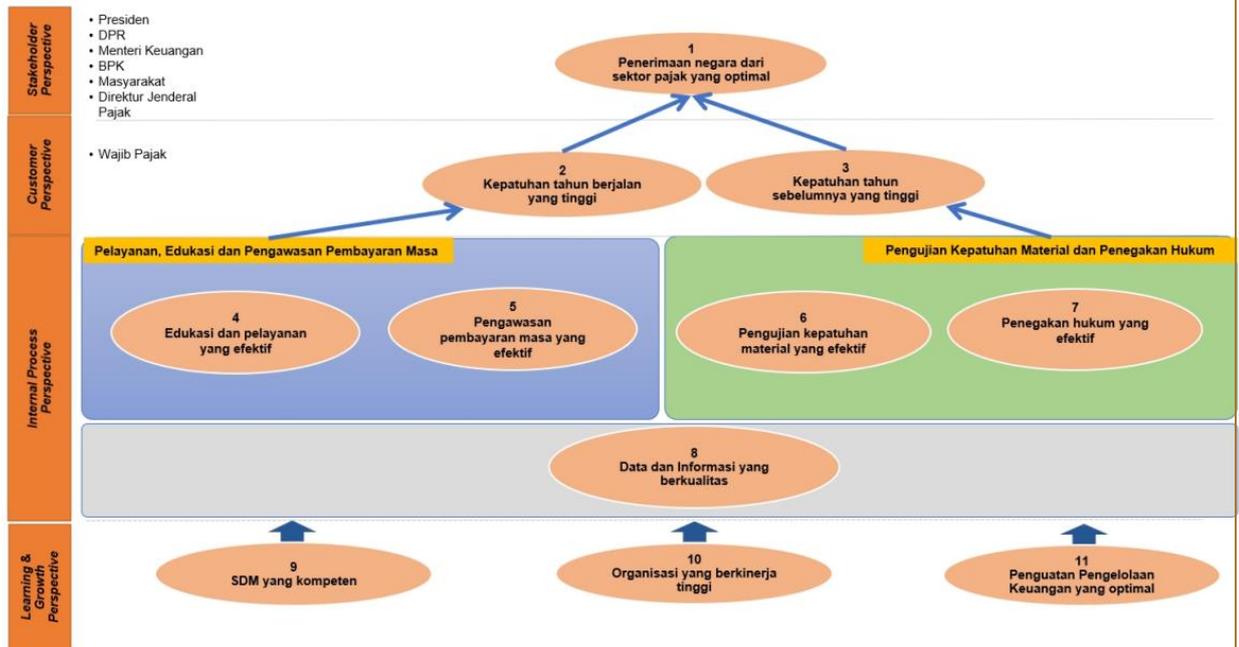
<i>Uraian</i>	Laki-Laki	Wanita	<i>Jumlah</i>
Jenis Kelamin	59	47	106

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Kontrak Kinerja 2024

Peta Strategi



No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100%
		9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85%
		9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%
10	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%

B. Target Penerimaan Pajak 2024

Target penerimaan pajak KPP Pratama Jayapura tahun 2024 sebagaimana rincian berikut:

Uraian Jenis Pajak	Target Penerimaan Pajak		Growth
	2024	2023	
	KEP-73/KPP.1804/2024	KEP-276/WPJ.18/2023	
PPh Non Migas	1,463,970,730,000	1,497,986,747,000	-2.27%
PPh OP	25,073,011,000	16,836,536,000	48.92%
PPh Pasal 21	726,684,799,000	675,641,892,000	7.55%
PPh Non Migas Non PPh OP dan Non PPh Pasal 21	712,212,920,000	805,508,319,000	-11.58%
PPN & PPnBM	1,369,545,294,000	926,058,840,000	47.89%
PBB	28,130,419,000	19,014,850,000	47.94%
Pajak Lainnya	25,028,306,000	27,147,860,000	-7.81%
Total	2,886,674,749,000	2,470,208,297,000	16.86%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	101,09
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,09
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,51%	Max	E/L	26%	57,78%	100,51
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,88	Max	P/L	19%	42,22%	101,88
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	100,31
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,62
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,54%	Max	E/L	26%	57,78%	100,54
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,72%	Max	P/L	19%	42,22%	100,72
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,01
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,01%	Max	E/M	21%	100,00%	100,01
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,63
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,38
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	108,75%	Max	E/M	21%	50,00%	108,75
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	114,76%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							116,11
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	121,85%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	108,32%	Max	P/M	14%	33,33%	108,32
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	112,24%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	166,58%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	97,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,24
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,48
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	116,55	Max	P/M	14%	33,33%	116,55
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,14	Max	P/M	14%	33,33%	113,11
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,00	Max	P/M	14%	33,33%	107,78
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,61

Secara umum, selama tahun 2024 KPP Pratama Jayapura menunjukkan kinerja capaian sasaran strategis yang memuaskan. Terdapat beberapa kendala khususnya dalam upaya pencapaian sasaran strategis Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi.

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Penerimaan Per Jenis Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	TARGET	REALISASI BRUTO	SPMKP	REALISASI NETTO 2024	REALISASI NETTO 2023	CAPAIAN (%)	PERTUMBUHAN NETTO (%)
A. Pajak Penghasilan	1.463.970.730.000	1.464.621.108.530	453.421.496	1.464.167.687.034	1.322.718.053.215	100,01	10,69
1. PPh NONGAS	1.463.970.730.000	1.464.614.260.530	453.421.496	1.464.160.839.034	1.322.718.028.015	100,01	10,69
1.1 PPh Pasal 21	726.684.799.000	713.920.514.856	11.094.356	713.909.420.500	572.449.639.113	98,24	24,71
1.2 PPh Pasal 22	80.014.966.000	67.080.089.895	0	67.080.089.895	74.083.060.001	83,83	-9,45
1.3 PPh Pasal 22 Impor	1.230.481.000	688.543.275	0	688.543.275	625.696.141	55,96	10,04
1.4 PPh Pasal 23	72.955.132.000	142.915.055.899	112.262.078	142.802.793.821	121.914.545.861	195,74	17,13
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	25.073.011.000	24.059.831.512	302.500	24.059.529.012	19.991.483.218	95,96	20,35
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	293.338.461.000	248.180.335.401	261.580.744	247.918.754.657	261.288.067.530	84,52	-5,12
1.7 PPh Pasal 26	142.993.000	40.999.846	0	40.999.846	62.255.061	28,67	-34,14
1.8 PPh Final	263.554.213.000	256.937.625.878	68.181.818	256.869.444.060	264.285.754.848	97,46	-2,81
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0
1.10 PPh Non Migas Lainnya	976.674.000	10.791.263.968	0	10.791.263.968	8.017.526.242	1.104,90	34,6
2. PPh MIGAS	0	6.848.000	0	6.848.000	25.200	0	27.074,60
2.1 PPh Minyak Bumi	0	4.688.000	0	4.688.000	25.200	0	18.503,17
2.2 PPh Gas Alam	0	0	0	0	0	0	0
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	0	2.160.000	0	2.160.000	0	0	0
B. PPN dan PPhnBM	1.369.545.294.000	1.442.603.055.842	60.445.892.458	1.382.157.163.384	1.327.528.108.617	100,92	4,12
1. PPN Dalam Negeri	1.362.952.486.000	1.429.072.857.507	60.445.892.458	1.368.626.965.049	1.322.531.028.989	100,42	3,49
2. PPN Impor	4.715.509.000	2.275.167.520	0	2.275.167.520	1.285.062.961	48,25	77,05
3. PPhnBM Dalam Negeri	1.642.740.000	10.645.143.139	0	10.645.143.139	2.482.695.253	648,01	328,77
4. PPhnBM Impor	1.909.000	5.023.000	0	5.023.000	1.332.683	263,12	276,91
5. PPN Lainnya	232.160.000	604.547.559	0	604.547.559	570.091.385	260,4	6,04
6. PPhnBM Lainnya	490.000	317.117	0	317.117	165.832.242	64,72	-99,81
7. PPN DN DTP	0	0	0	0	492.065.104	0	-100
8. PPNBM DTP	0	0	0	0	0	0	0
C. PBB dan BPHTB	28.130.419.000	28.649.416.401	0	28.649.416.401	23.812.711.792	101,84	20,31
1. Pendapatan PBB	28.130.419.000	0	0	0	23.812.711.792	0	-100
a. PBB Perdesaan	0	0	0	0	0	0	0
b. PBB Perkotaan	0	0	0	0	0	0	0
c. PBB Perkebunan	1.863.846.000	20.526.473.472	0	20.526.473.472	14.378.075.839	1.101,30	42,76
d. PBB Kehutanan	13.683.893.000	6.969.928.329	0	6.969.928.329	8.287.153.953	50,94	-15,89
e. PBB Pertambangan Minerba	2.757.586.000	1.153.014.600	0	1.153.014.600	1.147.482.000	41,81	0,48
f. PBB Migas	8.272.072.000	0	0	0	0	0	0
g. PBB Pertambangan	0	0	0	0	0	0	0
h. PBB lainnya	1.553.022.000	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan BPHTB	0	0	0	0	0	0	0
D. Pendapatan PPh DTP	0	-5.037.800	0	-5.037.800	805.930.283	0	-100,63
1. PPh Pasal 21	0	0	0	0	643.597.552	0	-100
2. PPh Pasal 22	0	0	0	0	0	0	0
3. PPh pasal 22 Impor	0	0	0	0	0	0	0
4. PPh Pasal 23	0	0	0	0	0	0	0
5. PPh Pasal 25/29 OP	0	-5.037.800	0	-5.037.800	-182.900	0	-2.654,40
6. PPh Pasal 25/29 Badan	0	0	0	0	0	0	0
7. PPh Pasal 26	0	0	0	0	0	0	0
8. PPh Final	0	0	0	0	162.515.631	0	-100
9. PPh Non Migas lainnya DTP	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH D	0	-5.037.800	0	-5.037.800	805.930.283	0	-100,63
E. Pajak Lainnya	25.028.306.000	26.403.934.726	0	26.403.934.726	25.930.314.583	105,5	1,83
1. Bea Meterai	305.350.000	2.334.210.000	0	2.334.210.000	1.376.861.000	764,44	69,53
2. Penjualan Benda Meterai	24.722.956.000	23.638.295.225	0	23.638.295.225	24.349.289.072	95,61	-2,92
3. PTLL	0	10.226.262	0	10.226.262	82.113.380	0	-87,55
4. Bunga Penagihan PPh	0	149.262.348	0	149.262.348	122.051.131	0	22,29
5. Bunga Penagihan PPN	0	271.940.891	0	271.940.891	0	0	0
6. Bunga Penagihan PPhnBM	0	0	0	0	0	0	0
7. Bunga Penagihan PTLL	0	0	0	0	0	0	0
8. PIB	0	0	0	0	0	0	0
9. PPN Batu Bara	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH (A + B + C + D + E)	2.886.674.749.000	2.962.272.477.699	60.899.313.954	2.901.373.163.745	2.700.795.118.490	100,51	7,43

Terdapat dua IKU pada sasaran strategis penerimaan negara dari sektor pajak yang Optimal. Pertama, persentase realisasi penerimaan pajak yang menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,51% atau sebesar Rp2.901.373.163.745,00. Di sisi lain, penerimaan tahun 2024 mengalami kontraksi sebesar 7,43 % dari kinerja penerimaan tahun sebelumnya. Kedua, indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, dimana kinerja pada periode ini menunjukkan capaian yang menggembirakan 101,88% dari target sebesar 100%.

Data pertumbuhan penerimaan pajak disajikan dalam tabel berikut:

Uraian Jenis Pajak	Target Penerimaan Pajak		Growth	Realisasi Neto		Growth
	2024	2023		2024	2023	
PPh Non Migas	1,463,970,730,000	1,497,986,747,000	-2.27%	1,464,160,839,034	1,323,323,796,900	10.64%
PPN & PPnBM	1,369,545,294,000	926,058,840,000	47.89%	1,382,157,163,384	1,328,096,362,555	4.07%
PBB	28,130,419,000	19,014,850,000	47.94%	28,649,416,401	23,812,711,792	20.31%
Pendapatan PPh DTP	-	-	0.00%	-5,037,800	806,768,607	-100.62%
Pajak Lainnya	25,028,306,000	27,147,860,000	-7.81%	26,403,934,726	26,221,053,522	0.70%
PPh Migas	-	-	0.00%	6,848,000	25,200	27074.60%
Total	2,886,674,749,000	2,470,208,297,000	16.86%	2,901,373,163,745	2,702,260,718,576	7.37%

Sedangkan deviasi proyeksi perencanaan kas pada sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 6,47%.

Rencana aksi terkait dengan sasaran strategis ini antara lain:

- a) Optimalisasi aktivitas pengawasan pembayaran masa dan pengujian kepatuhan material.
- b) Melakukan percepatan penyelesaian target kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PPM).
- c) Melakukan penambahan intensitas aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PPM) meskipun target aktivitas telah tercapai, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan manajemen waktu.
- d) Penggalan potensi perpajakan sedapat mungkin lebih difokuskan pada Wajib Pajak dengan *Ability to Pay* atau *Net Worth* yang tinggi.

2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Pada sasaran strategis ini terdapat dua IKU yang menyusunnya, yaitu persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi serta persentase realisasi penerimaan pajak

dari kegiatan pengawasan pembayaran masa. Berdasarkan data mandor DJP, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 mencapai 100,72% dari trajectory sebesar 100%.

Unit Kerja	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12=(6+7+8+9)/11 x 100%	13	14=12/13
NASIONAL	1.115.437	12.173.092	2.134.565	15.423.094	9.913.923	1.455.407	3.230.591	953.113	19.273.366	16.039.892	109,52%	100,00%	109,52%
300 - Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	15.324	366.370	44.952	426.646	220.212	130.765	45.229	30.440	518.627	421.073	109,19%	100,00%	109,19%
952 - KPP Pratama Jayapura	3.736	82.338	10.940	97.014	63.063	20.722	6.668	6.531	131.009	108.839	100,72%	100,00%	100,72%

Sedangkan capaian persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa tahun 2024 berdasarkan data mandor DJP adalah sebesar 100,54% atau senilai Rp2.748.276.778.944,00.

Unit Kerja	PPM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
300 - KANWIL DJP PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU	13.623.184.442.000	13.672.652.499.323	100,36%	100,00%	100,36%
952 - PRATAMA JAYAPURA	2.733.594.953.000	2.748.276.778.944	100,54%	100,00%	100,54%

Rencana aksi terkait dengan sasaran strategis ini antara lain:

- a) Menghubungi Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak agar menyampaikan SPT Tahunan PPh melalui berbagai sarana.
- b) Melakukan asistensi pengisian dan penyampaian SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak yang membutuhkan bantuan.
- c) Meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk menghimbau rekanan agar memenuhi kewajiban perpajakannya.
- d) Berkoordinasi / meminta bantuan anggota seksi lain dalam KPP untuk menghimbau rekanan agar memenuhi kewajiban perpajakannya.
- e) Menerbitkan Surat Teguran bagi Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh.
- f) Melakukan permintaan DPO kepada seksi Pelayanan bagi Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh.
- g) Penerbitan STP tahun pajak berjalan sesuai dafnom dalam Approweb atau berdasarkan hasil penelitian.
- h) Pengembangan aplikasi atau workbook pengawasan pembayaran masa (khususnya PPh Pasal 21 dan 25), dan mendorong stakeholder untuk memanfaatkan aplikasi atau workbook tersebut.
- i) Penerbitan himbauan pembayaran masa dan STP PPh Pasal 25 dengan mengacu pada data yang tersedia.
- j) Penelitian secara lebih mendalam terhadap permohonan pengurangan angsuran PPh 25 oleh Wajib Pajak.

- k) Melakukan kegiatan himbauan dinamisasi angsuran PPh 25, yaitu dengan terlebih dahulu melakukan penghitungan kembali dinamisasi angsuran terhadap Wajib Pajak yang terdapat indikasi kenaikan kegiatan usaha (misal dari omset PPN) berdasarkan KEP-537/PJ/2000.
- l) Pemanfaatan data pemicu tahun pajak berjalan.

3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Pengawasan kepatuhan material (PKM) adalah rangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak atas pelaporan dan pembayaran. PKM merupakan tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

Evaluasi capaian atas target kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Pajak	Target Penerimaan Pajak		Growth	Realisasi Neto		Growth
	2024	2023		2024	2023	
PKM	1,463,970,730,000	1,497,986,747,000	-2.27%	153,096,384,801	133,999,692,120	14.25%
PPM	1,369,545,294,000	926,058,840,000	47.89%	2,748,276,778,944	2,568,261,026,456	7.01%
Total	2,886,674,749,000	2,470,208,297,000	16.86%	2,901,373,163,745	2,702,260,718,576	7.37%

Rencana aksi terkait dengan sasaran strategis ini antara lain:

- a. Melakukan pemetaan risiko dan potensi Wajib Pajak dengan mengumpulkan data relevan khususnya yang berasal dari Approweb, Smart Board, dan PowerBI. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran Wajib Pajak atau sektor prioritas yang akan dilakukan penggalan potensi pajak.
- b. Pengembangan aplikasi atau workbook Analisis Laporan Keuangan (yang pada tahap awal berfokus pada WP sektor perdagangan), dengan tujuan memudahkan analisis bagi *stakeholder* dan deteksi kemungkinan salah saji dalam LK WP secara lebih cepat.
- c. Melakukan tindak lanjut atas LHA CTA, Kanwil, atau lainnya.
- d. Mengoptimalkan penggalan potensi via join program dengan Kanwil atau instansi luar DJP.

- e. Melakukan tindak lanjut terhadap data pemicu selain tahun pajak berjalan.
- f. Menerbitkan STP selain tahun berjalan sesuai dafnom dalam Approweb atau berdasarkan hasil penelitian.
- g. Melakukan bedah Wajib Pajak bersama tim Bedah WP di KPP, khususnya atas Wajib Pajak calon DPP atau yang akan diterbitkan LHPt.
- h. Melakukan permintaan bantuan penilaian kepada tim Penilai KPP atau Kanwil atas Wajib Pajak yang dalam proses penggalan potensi perpajakannya membutuhkan opini nilai wajar dari Penilai, baik nilai properti maupun bisnis.
- i. Melakukan uji persediaan terhadap WP sektor perdagangan yang terpilih.
- j. Penggalan potensi pajak Wajib Pajak Badan yang lebih berfokus pada Wajib Pajak dengan kriteria sebagai berikut:
 - i. anggota Wajib Pajak Grup,
 - ii. nilai *tax gap* tinggi, dan/atau
 - iii. kegiatan usaha non konstruksi.
- k. Penggalan potensi pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang lebih berfokus pada Wajib Pajak dengan kriteria sebagai berikut:
 - i. *High Wealth Individual*,
 - ii. Tidak mengikuti PPS,
 - iii. Nilai *tax gap* tinggi, dan/atau
 - iv. Pertambahan kekayaan bersih tidak tercermin dalam penghasilan Wajib Pajak.

4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Terdapat dua IKU pada sasaran strategis Edukasi dan Pelayanan yang Efektif. Pertama, persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan capaian kinerja sebesar 120% dari target 74%. Kedua, Indeks Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan yang mencapai 108,75% dari target sebesar 100%.

Rencana aksi terkait dengan sasaran strategis ini, antara lain:

- a. Membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Penerimaan SPT Tahunan

- b. Mengimbau WP yang belum wajib menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk elektronik, untuk menyampaikan SPT Tahunan melalui e-filing atau e-form pada laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui media WA Blast"
- c. Melakukan kelas pajak SPT Tahunan melalui e-filing kepada WP Karyawan bekerjasama dengan WP Pemberi Kerja
- d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan tidak langsung satu arah melalui media visual serta media sosial dalam bentuk poster, leaflet, selebaran dan/atau brosur terkait penyampaian SPT Tahunan
- e. Meningkatkan pelaksanaan penyuluhan tidak langsung dua arah melalui media sosial (Instagram Live)"
- f. Melaksanakan pemberdayaan Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) baik mahasiswa maupun non mahasiswa dalam asistensi pengisian SPT Tahunan
- g. Melakukan Kelas Pajak bagi Bendaharawan
- h. Melakukan Kelas Pajak bagi WP Badan
- i. Melakukan edukasi terhadap Wajib Pajak yang telah ditetapkan dalam DSPT Penyuluhan

5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Pada sasaran strategis Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif, terdapat IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa. Pada Tahun 2024, atas IKU tersebut tercapai 120% dari target 90%.

Rencana aksi terkait dengan sasaran strategis ini antara lain:

- a. Mendorong tindak lanjut yang cepat atas dafnom STP tahun pajak berjalan yang telah tersedia dalam Approweb.
- b. Mendorong penerbitan STP tahun pajak berjalan berdasarkan hasil penelitian mandiri.
- c. Mendorong tindak lanjut yang cepat atas data pemicu tahun pajak berjalan yang telah tersedia dalam Approweb.
- d. Mendorong tindak lanjut yang cepat atas dafnom dinamisasi PPh 25 yang telah tersedia dalam Approweb.
- e. Mendorong penerbitan himbauan dinamisasi PPh 25 berdasarkan hasil penelitian mandiri.

6. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

Pada sasaran strategis Pengujian kepatuhan material yang efektif, terdapat IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dan Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Pada Tahun 2024, atas kedua IKU tersebut tercapai 120,00% dari target 100% dan untuk IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 tercapai 108,32 % dari target 100%.

Rencana aksi terkait dengan sasaran strategis ini antara lain:

- a) Mendorong penyelesaian tepat waktu atau jangka waktu yang lebih pendek terhadap LHPT, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur esensial dalam LHPT, di antaranya penguangan hasil analisis laporan keuangan, data pemicu, mirroring hasil pemeriksaan atau upaya hukum, Transfer Pricing (apabila ada), analisis biaya, analisis penghasilan, PPN (bagi PKP), dan analisis potput.
- b) Mengundang Wajib Pajak yang tidak menanggapi SP2DK sesuai jangka waktu yang ditetapkan untuk melakukan pembahasan / konseling.
- c) Memberikan support dan pendampingan kepada AR dalam perolehan data/informasi, visit, melakukan analisis, pembahasan, konseling, dan pengusulan pemeriksaan khusus atau pemeriksaan bukti permulaan.
- d) Bagi WP dengan ATP rendah atau cash flow yang dikhawatirkan terganggu, Wajib Pajak didorong untuk melakukan angsuran pembayaran pajak.
- e) Mendorong percepatan usulan pemeriksaan khusus atau pemeriksaan bukti permulaan untuk Wajib Pajak dengan *tax gap* dan risiko tinggi.

7. Penegakan Hukum yang Efektif

Sasaran strategis ini mencakup tiga IKU yaitu: tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, tingkat efektivitas penagihan, dan persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan. Ketiga IKU tersebut menunjukkan capaian yang menggembirakan dengan capaian 120%, 120% dan 100% untuk masing-masing IKU secara berurutan.

8. Data dan Informasi yang Berkualitas

IKU yang diampu pada sasaran strategis ini adalah persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan serta persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Kedua IKU ini menunjukkan realisasi masing-masing sebesar 120% dari trajectory 100% dan 55% untuk IKU pertama dan kedua.

Rencana aksi terkait dengan sasaran strategis ini antara lain berkoordinasi dengan AR pengampu wilayah untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar diberikan data ILAP.

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU pada sasaran strategis ini adalah tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Trajectory IKU ini adalah 100%, sedangkan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 116,55% sehingga capaian pada IKU ini adalah 116,55%. Selain itu Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit dan Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebesar 113,11 % dan 107,78% dengan target masing masing 85 % dan 90%. Rencana aksi terkait dengan sasaran strategis ini antara lain memberikan support yang memadai kepada pegawai yang akan mengikuti ujian kompetensi sehingga pegawai dapat lebih mempersiapkan diri. KPP akan mendorong keterlibatan atasan langsung dalam rangka memberikan *coaching*.

10. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Sasaran strategis ini ditopang oleh IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Realisasi IKU pada sasaran strategis ini pada tahun 2024 mencapai 120% dari trajectory sebesar 100%. Rencana aksi terkait dengan sasaran strategis ini antara lain dengan melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat.

Tugas melakukan analisis dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan

pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan, adapun hal-hal yang dilakukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan STP, Fokus pada WP yang belum/terlambat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN
2. Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, PPh Final PP 46/PP 23 dan PPN
 - 1) Fokus pada WP Besar penentu penerimaan
 - 2) Berpatokan pada setoran masa April, minimal tidak turun ke depan.
 - 3) Pengawasan terhadap WP yang terlambat lapor setoran signifikan.
 - 4) Pengawasan (himbauan, visit, STP) terhadap WP TLTD.
3. Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25

Penghitungan kembali dan himbauan dinamisasi angsuran terhadap WP yang terdapat indikasi kenaikan kegiatan usaha (misal dari omset PPN) berdasarkan KEP-537/PJ/2000.
4. Pengawasan Wajib Pajak Instansi Pemerintah Pengguna DIPA APBD dan APBN
 - 1) Pemanfaatan data DTH/RTH
 - 2) Rekonsiliasi secara periodik data DTH/RTH dengan BPKAD dan Inspektorat.
 - 3) Komunikasi, Sosialisasi dan Konsultasi dengan Bendahara.
 - 4) Himbauan pencabangan NPWP rekanan PEMDA yang berasal di luar KPP Jayapura, khususnya konstruksi.
 - 5) Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. Pokok perubahan yang disampaikan adalah: Berdasarkan Lampiran VIII huruf A angka 7, Instansi Pemerintah menyetor PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan setoran pajak atas nama Instansi Pemerintah
 - 6) Pemanfaatan aplikasi Monitoring Bendahara (Monihara) untuk mengetahui persentase kepatuhan pembayaran pajak atas realisasi penggunaan DIPA

5. Pengawasan Wajib Pajak Instansi Pemerintah Desa/ Kampung

- 1) Penyampaian Kartu NPWP IP desa yang baru sebagai sarana untuk administrasi penerbitan billing pajak terhutang atas realisasi dana desa.
- 2) Koordinasi pembayaran atas pajak-pajak terhutang dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kampung (DPMK) di setiap Kabupaten dalam wilayah kerja
- 3) Asistensi perhitungan pajak-pajak terhutang atas realisasi penggunaan dana desa dan dana transfer APBD ke desa
- 4) Perbantuan penerbitan billing pajak
- 5) Koordinasi dengan tenaga pendamping desa dari Kementerian Desa mengenai pelaporan dan perhitungan pajak pajak terhutang atas realisasi penggunaan dana desa

6. Pemanfaatan Data Pemicu dalam Approweb

- 1) Pengusulan data pemicu dengan nilai signifikan kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)
- 2) Tindak lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) yang terdapat dalam approweb
- 3) Tindak lanjut atas SP2DK Outstanding dengan kegiatan konsultasi ke Wajib Pajak dan penerbitan LHP2DK dalam pengawasan atau tanpa realisasi
- 4) Secara periodik mengusulkan Wajib Pajak untuk diusulkan dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) ke Seksi P3
- 5) Penerbitan SP2DK dan konseling
- 6) Tindak lanjut LHA Kanwil dan LHA CTA
- 7) Tindak lanjut Data Perpajakan (Data Pemicu) Tahun Berjalan

7. Pemanfaatan Data Harta WP dari LPSE

- 1) Fokus pada data yang nilainya signifikan terlebih dahulu.
- 2) DPO bagi WP yang terdapat Data
- 3) Update profil WP yang melakukan konseling melalui pengisian checklist data profile WP.

8. Pemanfaatan Data BCIAsia dan Data LPJK

- 1) Melakukan klarifikasi dan konsultasi kepada Wajib Pajak atas data pembayaran proyek dalam data BCIAsia dan data LPJK yang tidak dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak

- 2) Himbauan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT dan melakukan pembayaran pajak terhutang atas data pembayaran proyek yang belum dilaporkan dalam SPT masa
9. Pemanfaatan data Harta Wajib Pajak untuk program PPS
- 1) Himbauan untuk mengikuti program PPS terhadap Wajib Pajak yang belum melaporkan harta dalam SPT
 - 2) Dilakukan permintaan penjelasan harta dengan Wajib Pajak yang tidak mengikuti program PPS
 - 3) Himbauan kepada Wajib Pajak yang tidak mengikuti program PPS pasca program PPS berakhir untuk melaporkan harta dan melakukan pembayaran PPh Final
10. Himbauan WP Dokter/Notaris
- 1) Undangan konseling bagi WP Dokter/Notaris.
 - 2) Penelitian kewajiban perpajakan 5 tahun ke belakang.
 - 3) Penerbitan STP bagi WP yang belum memenuhi kewajiban perpajakan.
 - 4) Update profil WP yang melakukan konseling melalui pengisian checklist data profile WP.
11. Pemanfaatan Data Bea Cukai/Syahbandar/Bandara
- 1) Penelitian kewajiban perpajakan WP yang terdapat data Bea Cukai (WP yang melakukan impor vanili dan produksi / distribusi MIMEA).
 - 2) Undangan konseling bagi para pemilik perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dan angkutan udara guna mendapatkan informasi core bisnisnya.
 - 3) Himbauan, visit, STP bagi WP yang belum memenuhi kewajiban perpajakan.
12. Optimalisasi Galpot WP Toko Bangunan
- 1) Melakukan canvassing atas seluruh toko bangunan.
 - 2) Penelitian kewajaran pertambahan nilai harta WP dengan jumlah penghasilan.
13. Optimalisasi Galpot WP Sektor Property
- 1) Gross up data setoran 411128-402 khususnya untuk WP yang melakukan transaksi berulang.
 - 2) Pengukuhan PKP secara jabatan bagi WP yang secara subjektif/objektif memenuhi.
 - 3) Penelitian kewajaran pertambahan nilai harta WP dengan jumlah penghasilan.
14. Optimalisasi Galpot WP Sektor Perdagangan
- 1) Pemanfaatan data syahbandar dan penerbangan.

- 2) Pengukuhan PKP secara jabatan bagi WP yang secara subjektif/objektif memenuhi.
 - 3) Optimalisasi setoran PP 46 bagi WP yang tidak pernah setor tapi ada kegiatan usaha.
 - 4) Penelitian kewajaran pertambahan nilai harta WP dengan jumlah penghasilan.
 - 5) Update profil WP yang melakukan konseling melalui pengisian checklist data profile WP.
15. Pemeriksaan P3, optimalisasi pemeriksaan P3 atas data konkret.
16. Usulan pemeriksaan dan pemeriksaan bukti permulaan (IDL) atas Wajib Pajak dengan risiko ketidakpatuhan yang tinggi atau pertimbangan lainnya.
17. Penggalan PPh Potput Sektor Konstruksi
- 1) Fokus pada kewajiban pemotongan/pemungutan.
 - 2) Penelitian pada SPT Tahunan WP yang tidak punya asset.
 - 3) Penelitaian pada WP yang tidak pernah membagikan dividen.
18. Penggalan PPh Potput Sektor Konstruksi
- 1) Melakukan WA Blast dan SMS blast
 - 2) Piket asistensi pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak dengan pembentukan Satgas SPT tahunan yang melibatkan Account Representative dan Kepala Seksi Pengawasan
19. Pemanfaatan Data Sasaran Ekstensifikasi (DSE)
- 1) Penerbitan SP2DK Ekstensifikasi atas data DSE yang telah diturunkan ke KPP
 - 2) Penerbitan NPWP baru atas data DSE yang telah di tindaklanjuti.

B. Capaian Kinerja dan Rencana Aksi Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan serta Seksi Pengawasan

1. Penyelesaian pemeriksaan selama tahun 2024 sebanyak 359 laporan dengan rincian sebagai berikut:

Pemeriksaan	Jumlah
Khusus	76
Data Konkret	19
Rutin-LB	124
Tujuan Lain	140
Jumlah	359

2. Usul pemeriksaan khusus data konkret pada tahun 2024 yang dilakukan oleh AR atas modus operandi dan penggalian potensi pajak.
3. Mendorong penyelesaian pemeriksaan tepat waktu atau jangka waktu yang lebih pendek dengan cara fokus pemeriksaan dengan membatasi cakupan audit melalui penyusunan *audit plan* yang terukur menyesuaikan jangka waktu dan beban penugasan pemeriksaan.

4. Penerimaan PKM Pemeriksaan dan Penagihan Tahun 2024:

Status Pembayaran	Jumlah Setor	Persen (%)
Sebelum Jatuh Tempo	36.384.726.948	61,97%
Teguran	5.032.982.815	8,57%
Paksa	8.285.458.873	14,11%
Blokir	1.684.630.277	2,87%
Sita	6.875.579.747	11,71%
Lelang	445.931.245	0,76%
Total	58.709.336.905	100.00%

5. Tindakan Penagihan Tahun 2024

Penagihan	Jumlah	% Thd Target	Pencairan	Waktu
Surat Teguran	4237 Lembar	139%	5,032,982,815	Jan - Des
Surat Paksa	2849 Lembar	121%	8,285,485,873	Jan - Des
SPMP	101 BA Sita	107%	1,684,630,277	Jan - Des
Pemblokiran Rekening	61 BA Blokir	120%	6,875,579,747	Jan - Des
Lelang	12 Aset	120%	445,931,245	Jan - Des
Pencegahan	0 Penanggung Pajak	0	-	Jan - Des
Jumlah			22,324,609,957	
Target Tahun 2024			22,324,609,000	
Pencapaian terhadap Target			100.00%	

6. Rencana Aksi Pemeriksaan dan Penagihan

a. Optimalisasi Tindakan Penagihan:

- Menerbitkan Surat Teguran sesuai dengan aturan yang berlaku
- Menyampaikan surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan target kepada masing-masing juru sita
- Meningkatkan penyitaan dengan target prioritas berdasarkan hasil Profiling dan Tracing Asset
- Meningkatkan upaya penagihan, diantaranya: Tracing Bank Account yang dilakukan dengan pengiriman permohonan pemblokiran ke bank dan penggunaan data AEOI di aplikasi Pegasus;

b. Optimalisasi Pengolahan Data Tunggakan Pajak SIDJP:

Seksi P3 bersinergi dengan Seksi PKD membuat basis data pengawasan tunggakan per tanggal 1 setiap bulannya. Pengawasan tersebut disusun menyesuaikan dengan masukan-masukan dari Juru Sita Pajak yang bertujuan untuk mempermudah penentuan target Wajib Pajak yang akan dilakukan tindakan penagihan, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut: tindakan penagihan yang telah dilakukan, alamat dan nomor telepon serta data pelaporan dan pembayaran 2 (dua) tahun terakhir;

- c. Dilakukan tindakan penagihan yang difokuskan pada WP DSPC dan WP PBB;
- b. Melakukan rapat pembahasan Komite Kepatuhan untuk mengusulkan DSPP;
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas usulan Pemeriksaan Khusus DSPP;
- d. Mengusulkan WP yang belum pernah diperiksa untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus DSPP;
- e. Manajemen restitusi;
- f. Percepatan penyelesaian tunggakan Pemeriksaan Rutin;
- g. Percepatan penyelesaian Pemeriksaan Khusus DSPP Tahun Pajak 2018 dan Pemeriksaan WP Grup;
- h. Pengujian di tempat Wajib Pajak untuk membandingkan kegiatan usaha yang dilaporkan dengan kegiatan usaha sebenarnya di lapangan
- i. Memastikan penyampaian SKP hasil pemeriksaan diterima WP; dan
- j. Menjalin sinergi FPP dan JSPN pasca SPHP.

7. Pengawasan Wajib Pajak Strategis

- Penggalan Potensi Wajib Pajak Grup yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura
- Sektor Jasa Keuangan
 - Pengujian pembayaran PPh Pasal 25 sesuai ketentuan yang berlaku dan PMK 215/PMK.03/2018 (tidak mengatur mengenai penghasilan tidak teratur)
 - Pengujian kewajiban *withholding taxes*
 - Pengujian biaya yang terindikasi tidak dapat dibiayakan (tantiem & jaspro dari laba bersih, biaya CSR terkait infrastruktur sosial)
 - Pengujian pembentukan dana cadangan yang dapat / tidak dapat dibiayakan
 - Pengujian pencadangan atas Piutang Tak Tertagih
 - Pengujian kesesuaian dafnom biaya promosi sesuai ketentuan yang berlaku

8. Pengawasan Wajib Pajak Kewilayahan

- Sektor Bendahara
 - Pemanfaatan aplikasi Monihara.
 - Koordinasi dengan BPKAD Propinsi kota dan kabupaten
- Sektor Konstruksi
 - Pemanfaatan Data BCI ASIA
 - Pemanfaatan Data LPJK
- Sektor Perdagangan
 - Pemanfaatan Data pembelian > 4.8M

C. Realisasi Anggaran

Uraian		Pagu	Realisasi	Penyerapan
Data dan Informasi Publik				
	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka Ekstensifikasi	482,441,000	465,318,458	96.45%
	Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	724,488,000	692,067,493	95.53%
Komunikasi Publik				
	Layanan dan Konsultasi Perpajakan	171,843,000	156,673,270	91.17%
	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	202,619,000	165,392,181	81.63%
Penanganan Perkara				
	Dokumen Penagihan Aktif	174,161,000	161,897,885	92.96%
Pemeriksaan dan Audit Penerimaan				
	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	165,625,000	159,937,096	96.57%
	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka Pengawasan	244,230,000	236,453,885	96.82%
	Laporan Penilaian	21,570,000	10,785,000	50.00%
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10,322,000	10,321,446	99.99%
Layanan Dukungan Manajemen Internal				
	Kerumahtanggaan	206,681,000	184,787,571	89.41%
	Layanan Perkantoran	6,692,944,000	6,398,274,454	95.60%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal				
	Peralatan Fasilitas Perkantoran	33,550,000	33,200,000	98.96%
Layanan Dukungan Manajemen Internal				
	Layanan Perkantoran	1,431,569,000	1,411,890,000	98.63%
Jumlah		10,562,043,000	10,086,998,739	95.50%

D. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Ruang lingkup perhitungan IKU "Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dalam empat aspek yaitu Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan Terhadap Regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan komponen hasil dan

komponen proses. Untuk kualitas hasil pelaksanaan anggaran KPP Pratama Jayapura mendapat capaian 100% dan nilai SMART 100 untuk tahun 2024.

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	063	015	409382	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAYAPURA	Nilai	100.00	94.55	93.72	100.00	100.00	99.77	100.00	97.90	100%	0.00	97.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.18	18.74	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	97.28		98.37				100.00				

Kode Kanwil	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
300	409382	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAYAPURA	100	100	100	100

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk komitmen dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan disusun sebagai pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran.

Laporan ini merupakan hasil akhir dari rangkaian Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan LAKIN itu sendiri. Secara umum kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik dengan capaian penerimaan sebesar Rp2.901.373.163.745,00 atau 100,51% dari target penerimaan sebesar Rp2.886.674.749.000, serta capaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 108,61%.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura untuk mencapai realisasi pertumbuhan dan pencapaian penerimaan yang optimal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. LAKIN tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan kepada Direktorat Jenderal Pajak maupun kepada pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura, sehingga dapat memberikan umpan balik guna meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.